

SKRIPSI
URGENSI PENGATURAN EKOSIDA SEBAGAI TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

MUHAMMAD ZAFIE ZULKA

2210113208

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 11/PK-IV/III/2026

LEMBAR PENGESAHAN

VALIDITY SHEET

No. Reg: 11/PK-IV/III/2026

URGENSI PENGATURAN EKOSIDA SEBAGAI TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

THE URGENCY OF REGULATING ECOCIDE AS AN ENVIRONMENTAL
CRIME IN INDONESIA

Disusun Oleh:

Author:

MUHAMMAD ZAFIF ZULKA

NIM: 2210113208

Program Kekhususan (PK): Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)

*Skripsi ini telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 Juni 2026 dan yang
bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji yang terdiri dari:*

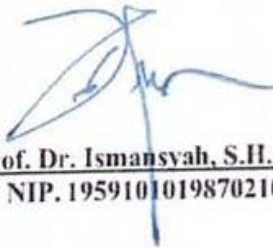
*This minor thesis was defended in a Comprehensive Examination Session on June 9, 2026, and the
relevant one was approved as PASSED by a Team of Examiners consisting of:*

Dekan
Dean



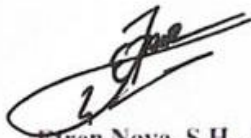
Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I
Supervisor I



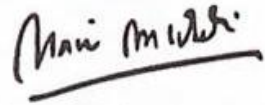
Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
NIP. 195910101987021002

Penguji I
Examiner I



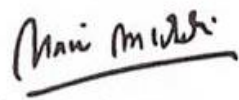
Eren Nova, S.H., M.H.
NIP. 196110111987022001

Wakil Dekan I
Vice Dean I



Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing II
Supervisor II



Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.
NIP. 198208092005012002

Penguji II
Examiner II



Felia Hermaventi, S.H., M.H.
NIP. 199812082024062001

	No. Alumni Universitas	Muhammad Zafif Zulka	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Kampung Baru Sentajo/27 Desember 2003 b. Nama Orang Tua : Zulkaneri, S.Sos., M.Si. dan Rumi Esa Fitri, S.E. c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210113208	f. Tanggal Lulus : 9 Juni 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan i. IPK : 3,82 j. Alamat : Jl. Barangan, Beringin Taluk, Kuantan Tengah	

URGENSI PENGATURAN EKOSIDA SEBAGAI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

(Muhammad Zafif Zulka, 2210113208, 91 Halaman, Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2026)

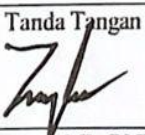
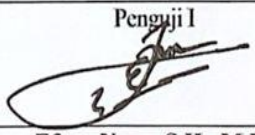
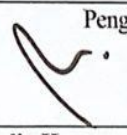
ABSTRAK

Urgensi pengaturan ekosida muncul sebagai respons atas kerusakan lingkungan hidup yang bersifat masif dan berdampak luas terhadap keberlanjutan ekosistem serta kehidupan manusia di Indonesia. Peristiwa seperti Lumpur Lapindo, kerusakan pesisir Pantai Utara Jawa, dan pertambangan di Raja Ampat menunjukkan dampak ekologis serius yang sulit atau bahkan tidak dapat dipulihkan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaturan ekosida sebagai tindak pidana lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan kedua, bagaimana urgensi pengaturan ekosida sebagai tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahannya hanya mengatur sebagian unsur yang berkaitan dengan ekosida, namun belum merumuskan ekosida sebagai delik tersendiri dengan karakteristik kerusakan yang bersifat masif dan berdampak luas. Adapun urgensi pengaturan ekosida didasarkan pada empat landasan utama. Pertama, ekosida melanggar prinsip keadilan antargenerasi karena kerusakan ekosistem yang masif dan tidak dapat dipulihkan merampas hak generasi mendatang atas opsi, kualitas, dan akses sumber daya alam, sehingga hakikatnya merupakan kejahatan terhadap masa depan. Kedua, berdasarkan kriteria Moeljatno, ekosida layak dikriminalisasi karena menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, memerlukan hukum pidana sebagai sarana pencegahan utama, dan didukung kemampuan penegakan hukum yang memadai. Ketiga, sebagai negara megabiodiversitas, kejahatan ekosida di Indonesia merupakan ancaman nyata terhadap sistem pendukung kehidupan dan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat, Rusia dan Kazakhstan sebagai negara penganut sistem hukum *civil law* telah lebih dahulu mengodifikasikan ekosida melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing-masing, sementara Indonesia belum memiliki pengaturan serupa.

Kata kunci: Peraturan Perundang-undangan, Ekosida, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

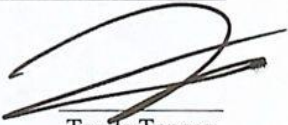
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 9 Juni 2026.

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Muhammad Zafif Zulka	Efren Nova, S.H., M.H.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Muhammad Zafif Zulka	Alumni Faculty Number
	a. Place/Date of Birth : Kampung Baru Sentajo/27 December 2003 b. Parents' Names : Zulkaneri, S.Sos., M.Si. and Rumi Esa Fitri, S.E. c. Faculty : Law d. CP : Criminal Law e. Student ID : 2210113208	f. Graduation Date : June 9 th 2026 g. Pass Predicate : Cum Laude h. Study Duration : 3 years 10 months i. GPA : 3,82 j. Address : Jl. Barangan, Beringin Taluk, Kuantan Tengah	

THE URGENCY OF REGULATING ECOCIDE AS AN ENVIRONMENTAL CRIME IN INDONESIA
(Muhammad Zafif Zulka, 2210113208, 91 Pages, Criminal Law (CP IV), Faculty of Law, Universitas Andalas, 2026)

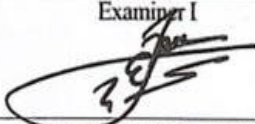
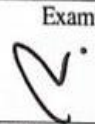
ABSTRACT

The urgency of regulating ecocide has emerged in response to massive environmental damage that has far-reaching impacts on the sustainability of ecosystems and human life in Indonesia. Incidents such as the Lapindo mudflow, the degradation of the North Java coast, and mining in Raja Ampat demonstrate serious ecological impacts that are difficult or even impossible to reverse. The issues examined in this study are, first, how ecocide is regulated as an environmental crime in Indonesian legislation; and second, the urgency of regulating ecocide as an environmental crime in Indonesia. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of the analysis show that Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, Law No. 41 of 1999 on Forestry, Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, along with its amendments, only regulate certain elements related to ecocide but have not yet defined ecocide as a distinct criminal offense characterized by massive and far-reaching damage. The urgency of regulating ecocide is based on four main principles. First, ecocide violates the principle of intergenerational justice because massive and irreversible ecosystem damage deprives future generations of their rights to options, quality, and access to natural resources, making it, in essence, a crime against the future. Second, based on Moeljatno's criteria, ecocide warrants criminalization because it causes significant harm to society, requires criminal law as the primary means of prevention, and is supported by adequate law enforcement capacity. Third, as a megabiodiversity nation, the crime of ecocide in Indonesia poses a real threat to life-support systems and the constitutional rights of citizens as guaranteed by Article 28H, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Fourth, Russia and Kazakhstan-as countries that follow the civil law system-have already codified ecocide in their respective Criminal Codes, while Indonesia does not yet have similar regulations.

Keywords: Legislation, Ecocide, Environmental Crimes.

This thesis has been defended in front of the Examiner Team and declared Passed on **June 9th, 2026.**

Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Muhammad Zafif Zulka	Elren Nova, S.H., M.H.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumni have registered with the Faculty/University and received an alumni number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: